

Peran Usmani dalam Pembentukan Pemerintahan Konstitusional di Turki Usmani

Rifki Saputra¹, Sri Suyanta²

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry¹

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry²

*Email Korespodensi: rifkisaputra7@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 28-06-2025

Disetujui 02-07-2025

Diterbitkan 04-07-2025

ABSTRACT

This study discusses the intellectual contribution of the Young Ottoman movement in the process of establishing a constitutional government in the Ottoman Empire in the second half of the 19th century, focusing on three central figures: Ibrahim Sinasi, Ziya Pasha, and Namik Kemal. Through a qualitative approach with a literature study method, this study traces how the three figures formulated the ideas of constitutionalism that combined modern Western political thought with Islamic values. Ibrahim Sinasi disseminated ideas about civil rights, public opinion, and constitutional government through written media. Ziya Pasha emphasized the importance of representative institutions and the need to adjust the modern government system to the principles of Islamic law. Meanwhile, Namik Kemal championed the concept of popular sovereignty, a representative system, and separation of powers, and made a direct contribution to the drafting of the 1876 Constitution. The results of the study show that although they have not succeeded in changing the government structure directly, the thoughts of the Young Ottoman figures have formed an important foundation for the transition to a constitutional and modern government system in Turkey.

Keywords: *Young Ottoman; constitutionalism; reform; Ottoman Turkey; Islamic political thought; modernization*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kontribusi intelektual gerakan Usmani Muda dalam proses pembentukan pemerintahan konstitusional di Kesultanan Utsmani pada paruh kedua abad ke-19, dengan fokus pada tiga tokoh sentral: Ibrahim Sinasi, Ziya Pasya, dan Namik Kemal. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, kajian ini menelusuri bagaimana ketiga tokoh tersebut merumuskan gagasan-gagasan konstitusionalisme yang menggabungkan pemikiran politik modern Barat dengan nilai-nilai Islam. Ibrahim Sinasi menyebarkan ide tentang hak-hak sipil, opini publik, dan pemerintahan konstitusional melalui media tertulis. Ziya Pasya menekankan pentingnya lembaga perwakilan rakyat serta perlunya menyesuaikan sistem pemerintahan modern dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sementara itu, Namik Kemal memperjuangkan konsep kedaulatan rakyat, sistem perwakilan, dan pemisahan kekuasaan, serta memberikan kontribusi langsung terhadap penyusunan Undang-Undang Dasar 1876. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun

belum berhasil mengubah struktur pemerintahan secara langsung, pemikiran para tokoh Usmani Muda telah membentuk landasan penting bagi transisi menuju sistem pemerintahan konstitusional dan modern di Turki.

Kata Kunci: Usmani Muda; konstitusionalisme; reformasi; Turki Utsmani; pemikiran politik Islam; modernisasi



PENDAHULUAN

Pada paruh kedua abad ke-19, Kekaisaran Usmani dihadapkan pada berbagai persoalan krusial yang berasal dari dinamika internal maupun tekanan eksternal. Kemunduran kekuatan militer, disfungsi dalam struktur birokrasi, serta penetrasi pengaruh peradaban Barat semakin menegaskan urgensi dilakukannya reformasi menyeluruh dalam tatanan politik dan administrasi negara. Dalam konteks krisis tersebut, muncul suatu kelompok intelektual progresif yang dikenal sebagai Usmani Muda (Young Ottomans). Kelompok ini terdiri atas para pemikir, birokrat, dan jurnalis yang menyuarakan kritik terhadap sistem pemerintahan absolut Sultan. Mereka mengedepankan gagasan-gagasan baru yang berpijak pada prinsip kebebasan, keadilan, serta pentingnya penerapan pemerintahan yang berlandaskan konstitusi sebagai langkah menuju modernisasi politik Kekaisaran Usman

Usmani Muda merupakan sebuah gerakan intelektual yang berupaya mensintesis pemikiran modern Barat dengan nilai-nilai Islam, dalam rangka menciptakan keseimbangan antara pelestarian tradisi dan kebutuhan akan pembaruan. Tujuan utama mereka adalah mencegah keruntuhan Kekaisaran Usmani melalui reformasi struktural. Kelompok ini secara tegas menolak praktik absolutisme yang dijalankan oleh Sultan serta para pejabat Tanzimat, dan menuntut diterapkannya sistem pemerintahan yang berpijak pada supremasi hukum dan konstitusi yang menjamin hak-hak sipil rakyat. Pasca terbongkarnya aktivitas mereka, sebagian besar anggota Usmani Muda memilih untuk mengasingkan diri ke Eropa, di mana mereka terpapar secara intensif pada ide-ide liberalisme dan konstitusionalisme Barat. Gagasan-gagasan tersebut kemudian mereka adaptasi dan bawa kembali ke wilayah Usmani sebagai bagian dari strategi perjuangan mereka. Puncak kontribusi politik Usmani Muda terjadi ketika Sultan Abdul Hamid II, di bawah tekanan internal dan eksternal termasuk dari kelompok ini, menyetujui pemberlakuan Konstitusi Usmani pertama (Kanun-i Esasi) pada 23 Desember 1876. Meskipun konstitusi ini masih memberikan otoritas yang besar kepada Sultan, pengesahannya menjadi tonggak historis dalam perjalanan menuju sistem pemerintahan konstitusional. Peran Usmani Muda dalam fase ini sangat signifikan, karena mereka tidak hanya menjadi pelopor pengenalan ide-ide konstitusionalisme dalam ruang publik Usmani, tetapi juga membuka ruang bagi berkembangnya diskursus politik yang lebih inklusif. Selain itu, mereka turut membangun fondasi intelektual dan politis yang kelak dilanjutkan oleh gerakan Turki Muda, yang membawa agenda perubahan politik yang lebih radikal pada awal abad ke-20.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji berbagai sumber sejarah yang tersedia mengenai peran Usmani Muda dalam proses pembentukan pemerintahan konstitusional di Turki Usmani. Kajian ini tidak hanya relevan untuk memahami dinamika politik dan sosial yang berkembang pada periode tersebut, tetapi juga penting dalam menggambarkan bagaimana wacana modernisasi dan demokratisasi mulai memasuki dunia Islam melalui proses internalisasi, adaptasi, dan perjuangan intelektual yang kompleks.

METODE PELAKSANAAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum benda dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, serta mengintegrasikan pendekatan normatif dan sosiologis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber relevan, seperti buku, jurnal, dan literatur terkait lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Ibrahim Sinasi

Ibrahim Sinasi salah satu dari beberapa tokoh usmani muda turki yang berperan penting dalam pemerintahan konstitusional turki sebagai pionir intelektual yang menyebarluaskan gagasan mengenai hak-hak masyarakat, opini publik, kesadaran nasional, dan pemerintahan berdasarkan konstitusi melalui media tertulis. Karya-karyanya menjadi sumber inspirasi bagi gerakan reformasi dan mendorong perubahan sosial-politik di Kesultanan Utsmani ke arah sistem pemerintahan yang lebih modern dan konstitusional, walaupun pada saat itu belum berhasil secara langsung mengubah pemerintahan.

Ibrahim Sinasi merupakan salah satu tokoh penting dari gerakan Usmani Muda yang memainkan peran signifikan dalam membentuk fondasi pemikiran pemerintahan konstitusional di Kesultanan Utsmani. Melalui karya-karya tulisnya, Sinasi menyuarakan gagasan-gagasan progresif mengenai hak-hak masyarakat, pentingnya opini publik, kesadaran nasional, serta urgensi pemerintahan yang berbasis konstitusi. Pemikirannya menjadi inspirasi utama bagi gerakan reformasi intelektual dan sosial-politik, mendorong transisi menuju sistem pemerintahan yang lebih modern dan terbuka. Meskipun upayanya belum mampu mengubah struktur kekuasaan secara langsung pada masanya, kontribusinya membentuk landasan penting bagi perkembangan ide-ide konstitusionalisme di dunia Turki modern.

b. Ziyad Pasya

Ziya Pasya memainkan peran krusial dalam pembentukan pemerintahan konstitusi di Turki Usmani dengan mengusulkan sistem pemerintahan yang mengadopsi prinsip konstitusionalisme Eropa, yang mencakup adanya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan di antara masyarakat adalah anugerah dari Tuhan dan perlu diakomodasi dalam DPR untuk dijadikan acuan dalam kebijakan pemerintah demi kesejahteraan rakyat. Di samping itu, Ziya Pasya menekankan bahwa konstitusi Kesultanan Usmani perlu berlandaskan pada syariat Islam, sehingga peremajaan tidak harus sepenuhnya mencontoh Barat, tetapi disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam.

Ziya Pasya merupakan tokoh penting dalam perumusan pemerintahan konstitusional Kesultanan Utsmani dengan mengusulkan pembentukan DPR sebagai wadah aspirasi rakyat, yang mencerminkan pandangan bahwa perbedaan adalah anugerah Tuhan. Ia menekankan bahwa reformasi harus berlandaskan syariat Islam, sehingga modernisasi tidak meniru Barat secara utuh, melainkan disesuaikan dengan nilai-nilai Islam.

c. Namik Kemal

Namik Kemal berperan penting dalam pembentukan pemerintahan konstitusional di Turki Utsmani dengan mengusulkan sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan penggunaan sistem perwakilan. Ia mengajukan model konstitusi yang memisahkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta menekankan pentingnya hak-hak politik rakyat yang harus dilindungi negara. Ide-idennya menjadi dasar dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1876 Kesultanan Utsmani.

Namik Kemal berkontribusi signifikan dalam mendorong pemerintahan konstitusional di Kesultanan Utsmani dengan mengusung prinsip kedaulatan rakyat, sistem perwakilan, serta pemisahan kekuasaan negara. Ia menekankan pentingnya perlindungan hak-hak politik warga, dan gagasan-gagasannya menjadi landasan penting dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1876.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh-tokoh Usmani Muda seperti Ibrahim Sinasi, Ziya Pasya, dan Namik Kemal memiliki kontribusi fundamental dalam perkembangan awal pemikiran konstitusional di Kesultanan Utsmani. Ibrahim Sinasi berperan sebagai pionir intelektual yang melalui media tulis menyebarluaskan gagasan modern mengenai hak-hak masyarakat dan pemerintahan berbasis konstitusi. Ziya Pasya mengintegrasikan prinsip-prinsip konstitusionalisme Eropa dengan nilai-nilai Islam, menekankan pentingnya Dewan Perwakilan sebagai forum aspirasi rakyat dan pluralisme. Sementara itu, Namik Kemal mengusung konsep kedaulatan rakyat, sistem perwakilan, dan pemisahan kekuasaan, serta menjadi salah satu penggagas utama Undang-Undang Dasar 1876. Ketiga tokoh ini, meskipun tidak secara langsung mengubah struktur pemerintahan, telah meletakkan dasar intelektual dan ideologis bagi terbentuknya sistem pemerintahan konstitusional di Turki modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasution, Harun. *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang. 1992.
- Abdul Khaliq dkk, “*Tokoh Utsmani Muda Dan Ide Pembaharuannya*”, *Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir*, Vol. 7 No. 2, (2022), hal. 1.
- Niyazi Berkes. *The Development of Secularism in Turkey*. Montreal: Mc Gill University press, 1964, hal, 205.
- Muhammad Iqbal & Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana. 2010.